

Analisis Transparansi Manajerial pada Perusahaan Transportasi Tambang (Studi Kasus: PT Surya Saputra Sentosa)

A. Musyarrafah Vetriyani¹, Anshar²

D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Ujung Pandang^{1,2}

Email: amusyarrafah@poliupg.ac.id, anshar0110@gmail.com

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 09-07-2025 | Diterbitkan: 11-07-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of managerial transparency in a mining transportation company, focusing on a case study of PT Surya Saputra Sentosa, operating in the nickel mining area of Southeast Sulawesi, Indonesia. Managerial transparency is one of the key pillars in the application of good corporate governance, especially in the mining sector, which is characterized by complex and high-risk operations. This research employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and limited observations of reporting flows and managerial decision-making processes. The findings reveal that transparency practices at PT Surya Saputra Sentosa remain partial and lack formal structure. The company faces several challenges, including the absence of technology-based reporting systems, dominance of informal communication, and limited managerial understanding of good corporate governance principles. Nevertheless, there are initial efforts by management to improve reporting systems and clarify roles and responsibilities. This study offers practical insights for developing a more adaptive transparency system in medium-scale mining transportation companies.

Keywords: managerial transparency, mining transportation, case study, GCG, PT Surya Saputra Sentosa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi manajerial pada perusahaan transportasi tambang, dengan fokus pada studi kasus PT Surya Saputra Sentosa yang beroperasi di wilayah pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Transparansi manajerial merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, terutama di sektor pertambangan yang memiliki karakteristik operasional kompleks dan berisiko tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap alur pelaporan dan pengambilan keputusan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi di PT Surya Saputra Sentosa masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara formal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya sistem pelaporan berbasis teknologi, komunikasi organisasi yang masih dominan informal, serta keterbatasan pemahaman manajemen mengenai prinsip Good Corporate Governance. Namun demikian, terdapat inisiatif awal dari manajemen dalam memperbaiki sistem pelaporan dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan sistem transparansi yang lebih adaptif di perusahaan transportasi tambang skala menengah.

Kata kunci: Transparansi manajerial, transportasi tambang, studi kasus, GCG, PT Surya Saputra Sentosa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

A. Musyarrafah Vetriyani, & Anshar. (2025). Analisis Transaparansi Manajerial pada Perusahaan Transportasi Tambang (Studi Kasus: PT Surya Saputra Sentosa). PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2b), 4327-4335.
<https://doi.org/10.62710/cyy1bt51>

PENDAHULUAN

Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan tata kelola yang baik (good governance), transparansi manajerial menjadi salah satu prinsip fundamental dalam membangun kepercayaan internal dan eksternal suatu organisasi. Perusahaan yang menerapkan transparansi secara efektif cenderung memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, efisien, dan berdampak positif pada hubungan kerja serta reputasi jangka panjang. Penerapan prinsip GCG dalam usaha pertambangan masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya literasi tata kelola dan dominasi keputusan top-down tanpa mekanisme kontrol yang kuat (Sulaiman & Yuniarti, 2020).

Transparansi manajerial merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Di sektor pertambangan, khususnya dalam aktivitas transportasi hasil tambang, tantangan terhadap transparansi menjadi lebih kompleks karena sifat operasional yang berisiko tinggi, melibatkan banyak pihak, dan sering kali berlangsung di lokasi terpencil. Praktik manajerial yang transparan memungkinkan adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pelaporan, dan komunikasi internal, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional dan kepercayaan stakeholder. Dalam praktik logistik tambang, transparansi informasi antar divisi sering kali terhambat oleh struktur organisasi yang datar dan belum adanya sistem informasi manajemen yang memadai (Tjahjono, 2019).

PT Surya Saputra Sentosa merupakan perusahaan transportasi tambang yang beroperasi dalam wilayah pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini menyediakan layanan pengangkutan material tambang menggunakan dump truck dan alat berat lainnya, serta memiliki kontrak kerja dengan perusahaan tambang utama. Seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan akuntabilitas dalam proyek pertambangan, aspek transparansi dalam pengelolaan transportasi tambang menjadi isu yang krusial. Prinsip transparansi menuntut perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi material secara tepat waktu dan akurat, termasuk struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan keputusan strategis utama (OECD, 2015).

Dalam praktiknya, banyak perusahaan transportasi tambang mengalami kendala dalam menciptakan sistem manajerial yang transparan. Beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur digital, dominasi keputusan pada manajemen puncak, kurangnya sistem pelaporan yang terdokumentasi, hingga ketergantungan pada komunikasi informal, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan budaya transparansi.

Melalui studi kasus ini, peneliti akan mengkaji bagaimana transparansi manajerial diterapkan dalam konteks operasional transportasi tambang di PT Surya Saputra Sentosa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai praktik transparansi manajerial di sektor yang sangat teknis dan dinamis.

TINJAUAN PUSTAKA

Transparansi Manajerial

Transparansi manajerial merupakan bentuk keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan, dan komunikasi yang dilakukan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Transparansi menjadi bagian penting dari praktik tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance) karena dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan, serta memperkuat akuntabilitas (IFC, 2009).

Menurut OECD (2015), transparansi melibatkan pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks internal organisasi, transparansi berkaitan erat dengan sejauh mana manajemen membuka informasi kepada karyawan dan mengikutsertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan (Tjahjono, 2019).

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemangku kepentingan dalam perusahaan, dengan prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (OECD, 2015). Transparansi manajerial merupakan salah satu prinsip paling penting karena menjadi dasar dari keterbukaan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang objektif.

Sulaiman & Yuniarti (2020) menyatakan bahwa implementasi GCG pada sektor pertambangan seringkali belum optimal, terutama pada perusahaan menengah yang belum memiliki sistem formal. Kurangnya edukasi tentang GCG, dominasi kepemimpinan yang sentralistik, serta belum tersedianya sistem informasi manajemen menjadi penghambat utama.

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan antara pemilik usaha (principal) dan pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha, yaitu manajer atau agen (agent). Dalam konteks perusahaan, pemilik modal biasanya mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan kepada manajemen. Namun karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, sering muncul ketidaksesuaian tujuan (goal conflict) yang dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost).

Masalah utama dalam hubungan keagenan adalah asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal. Jika informasi tidak terbuka, pemilik usaha tidak dapat memastikan apakah manajer menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan perusahaan atau kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, transparansi manajerial menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan akuntabilitas. Dalam konteks perusahaan transportasi tambang seperti PT Surya Saputra Sentosa, hubungan keagenan dapat terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajer operasional, atau antara manajer dengan supervisor lapangan. Transparansi dibutuhkan untuk memastikan bahwa penggunaan armada, pengelolaan bahan bakar, jadwal kerja operator, serta pelaporan kerusakan dilakukan secara jujur dan objektif.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi berbasis teori agensi dalam perusahaan transportasi tambang menjadi semakin penting karena tingginya risiko manipulasi data di lapangan, seperti dalam pelaporan trip harian, pemakaian bahan bakar, dan jam kerja operator. Jika transparansi tidak dijaga, potensi kerugian perusahaan akan meningkat akibat moral hazard dari pihak internal.

Karakteristik Perusahaan Transportasi Tambang

Perusahaan transportasi tambang merupakan bagian dari rantai logistik pertambangan yang bertugas mengangkut hasil tambang (misalnya ore atau batu bara) dari front tambang ke lokasi stockpile atau pelabuhan. Operasional perusahaan ini sangat tergantung pada armada dump truck, operator, serta pengelolaan jadwal kerja yang efisien dan aman.

Menurut Tjahjono (2019), struktur organisasi di perusahaan jasa hauling tambang umumnya masih bersifat datar (flat organization), dengan komunikasi dominan informal melalui media seperti WhatsApp. Hal ini sering menjadi hambatan dalam pencatatan formal dan pelaporan kerja harian, terutama jika tidak didukung dengan sistem manajemen digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengeksplorasi praktik transparansi manajerial di PT Surya Saputra Sentosa, sebuah perusahaan transportasi tambang di Sulawesi Tenggara. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive terhadap pihak manajemen dan staf operasional yang dianggap memiliki pengetahuan relevan terhadap sistem pelaporan dan pengambilan keputusan di perusahaan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi persepsi, praktik, hambatan, dan strategi yang digunakan oleh manajemen melalui interaksi langsung dengan narasumber (Creswell & Poth, 2018)

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen internal, serta observasi terbatas terhadap alur komunikasi dan pelaporan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, konfirmasi hasil (member checking), dan catatan audit trail.

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas responden dan menjelaskan tujuan penelitian kepada seluruh partisipan sebelum wawancara dilakukan. Persetujuan dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, sesuai dengan prinsip etika penelitian sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi manajerial di PT Surya Saputra Sentosa, perusahaan transportasi tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Data diperoleh melalui wawancara dengan direktur operasional, manajer proyek, staf administrasi, dan supervisor lapangan. Tiga tema utama ditemukan dari hasil wawancara: bentuk transparansi yang diterapkan, hambatan transparansi, dan peran pemilik dalam struktur pengambilan keputusan.

Praktik Transparansi Manajerial

Dari hasil wawancara diketahui bahwa transparansi dalam pelaporan operasional sudah berjalan sebagian, khususnya di level teknis. Supervisor lapangan melaporkan ritasi dump truck, penggunaan bahan bakar, serta kondisi kendaraan setiap hari.

“Kami bikin laporan harian armada, jumlah rit dan catatan masalah unit. Tapi laporan itu langsung saya kirim ke WA direktur, bukan lewat sistem,” (Supervisor Lapangan, wawancara, 2025).

Staf administrasi juga memiliki peran dalam rekap laporan manual dan membuat laporan keuangan dasar, tetapi hanya terbatas untuk kebutuhan internal direktur. Berdasarkan wawancara dengan Manajer Operasional dan Supervisor Lapangan, ditemukan bahwa beberapa bentuk transparansi telah diterapkan, walaupun belum bersifat sistemik. Misalnya, supervisor diwajibkan membuat laporan harian armada berupa jumlah ritasi, pemakaian BBM, dan kondisi unit.

“Kami biasa melaporkan jam kerja dan ritasi dump truck setiap hari lewat grup WA, dan sesekali lewat Google Sheet yang dishare oleh staf admin,” (Wawancara, Supervisor Lapangan).

Namun demikian, laporan ini masih bergantung pada kesadaran masing-masing supervisor dan belum dikaitkan langsung dengan sistem evaluasi atau pelaporan keuangan. Informasi keuangan perusahaan, seperti biaya operasional atau tagihan ke klien, hanya diketahui oleh direktur dan staf keuangan.

“Laporan keuangan hanya diketahui oleh atasan langsung dan bagian keuangan, staf lapangan biasanya hanya tahu data teknis operasional saja,” (Wawancara, Staf Administrasi).

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi vertikal ke bawah belum merata, meskipun ada transparansi horizontal antar divisi teknis.

Hambatan Transparansi dan Sentralisasi Keputusan

Temuan penting dari wawancara adalah bahwa keputusan manajerial strategis sepenuhnya berada di tangan komisaris utama, yang juga merupakan pemilik perusahaan. Meskipun secara struktural perusahaan memiliki direktur operasional dan manajer proyek, semua keputusan kunci seperti pengadaan unit baru, kontrak dengan klien, hingga penentuan anggaran harus mendapat persetujuan langsung dari komisaris.

“Sebenarnya kami hanya menjalankan. Semua keputusan tetap tergantung perintah dari Pak Komisaris. Kadang sudah ada rencana, tapi kalau beliau tidak setuju, ya tidak jalan,” (Manajer Proyek, wawancara, 2025).

Hal ini menunjukkan tingginya tingkat sentralisasi, bahkan melewati batas fungsional struktur formal. Dominasi pemilik sebagai komisaris dalam pengambilan keputusan mengurangi ruang otonomi manajemen untuk berinisiatif.

Dampaknya, Informasi penting hanya mengalir satu arah ke pemilik (top-down), bukan terbuka untuk semua divisi. Karyawan bawah merasa tidak memiliki wewenang penuh untuk bertindak, sehingga proses pelaporan menjadi formalitas semata. Pengambilan keputusan menjadi lambat dan bersifat reaktif.

Strategi Awal dan Kesadaran Manajerial

Meski sistem transparansi belum terstruktur, manajemen menaruh perhatian pada efisiensi pelaporan. Beberapa langkah mulai dilakukan, seperti uji coba Google Sheet untuk pelaporan ritasi, pembuatan form laporan harian unit, dan pembentukan PIC proyek. Namun, langkah-langkah ini masih terkendala oleh dominasi pemilik dalam proses finalisasi kebijakan.

“Kadang kami sudah buat sistem pelaporan, tapi kalau tidak direstui langsung, ya tidak dipakai juga,” (Direktur Operasional, wawancara, 2025).

Pembahasan Teoritis

Kondisi ini menguatkan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) muncul ketika informasi tidak disampaikan

secara seimbang. Di PT Surya Saputra Sentosa, pemilik berperan ganda sebagai pengendali dan pengambil keputusan, sehingga potensi konflik peran (role conflict) sangat besar.

Situasi ini menyebabkan sistem manajerial yang seharusnya berbasis prosedur dan delegasi menjadi terhambat oleh struktur otoriter yang berbasis trust dan instruksi langsung dari komisaris. Ini juga menjelaskan mengapa sistem pelaporan keuangan internal dan kebijakan transparansi tidak berkembang optimal, karena tidak didukung oleh kehendak pemilik sebagai penguasa tunggal informasi dan keputusan.

Penemuan ini sejalan dengan studi Sulaiman & Yuniarti (2020), yang mencatat bahwa perusahaan tambang skala menengah sering kali mengalami stagnasi tata kelola karena terlalu tergantung pada pemilik tunggal, bukan sistem. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan skala menengah umumnya belum memiliki sistem transparansi yang mapan, terutama karena faktor budaya kerja dan keterbatasan teknologi.

Namun demikian, keberadaan inisiatif informal seperti pelaporan via Google Sheet dan komunikasi terbuka antara tim lapangan menunjukkan adanya modal awal (initial governance culture) yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih terstruktur ke depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi manajerial dalam operasional perusahaan transportasi tambang dengan studi kasus pada PT Surya Saputra Sentosa. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan analisis tematik, diperoleh beberapa kesimpulan utama yakni, transparansi manajerial pada level operasional bersifat terbatas dan informal. Praktik pelaporan seperti ritasi, penggunaan bahan bakar, dan kondisi armada telah dilakukan oleh supervisor lapangan secara rutin. Namun, pelaporan ini tidak terintegrasi dalam sistem formal dan hanya dikirim secara manual melalui aplikasi pesan instan. Informasi finansial dan keputusan strategis tidak dibagikan secara terbuka kepada seluruh lapisan organisasi.

Struktur pengambilan keputusan bersifat sangat tersentralisasi di tangan komisaris yang juga bertindak sebagai pemilik perusahaan. Seluruh kebijakan strategis, pengadaan, dan keputusan operasional penting ditentukan langsung oleh komisaris. Meskipun terdapat direktur operasional dan manajer proyek, fungsi manajerial mereka terbatas pada pelaksanaan teknis dan belum memiliki otonomi penuh dalam membuat keputusan. Minimnya pemisahan peran antara pemilik dan manajemen menjadi hambatan utama dalam membangun sistem transparansi yang sehat.

Ketergantungan yang tinggi terhadap otorisasi dari pemilik membuat inisiatif sistem pelaporan atau digitalisasi administrasi kerap tertunda atau tidak dijalankan. Hal ini berisiko menurunkan efisiensi, kepercayaan internal, serta menciptakan ketimpangan informasi antar level organisasi. Kesadaran akan pentingnya transparansi mulai tumbuh di level manajemen teknis.

Meskipun masih terbatas, terdapat upaya awal dari tim manajemen untuk membangun sistem pelaporan yang lebih terbuka, termasuk melalui penggunaan Google Sheet, form laporan harian, dan penunjukan PIC proyek. Namun, inisiatif ini belum mendapat dukungan penuh secara struktural.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pemurnian peran manajerial dan pemilik dalam organisasi, serta perlunya sistem pelaporan berbasis teknologi yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas. Tanpa itu, praktik transparansi hanya akan bersifat simbolis dan tidak berdampak nyata dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Hasil sintesis dari beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan transparansi manajerial pada perusahaan transportasi tambang terletak pada kombinasi antara sentralisasi kekuasaan manajerial, keterbatasan infrastruktur digital, dan dominasi budaya komunikasi informal. Kepemilikan yang terpusat pada satu individu atau kelompok kecil cenderung menghambat proses pengambilan keputusan kolektif yang transparan dan akuntabel (Simanjuntak & Lestari, 2022), sementara minimnya digitalisasi pelaporan menyebabkan aliran informasi menjadi lambat, tidak terdokumentasi dengan baik, dan rawan manipulasi (Yuliana & Prasetyo, 2021).

Sebaliknya, digitalisasi pelaporan telah terbukti mampu menjadi solusi strategis dalam meningkatkan keterbukaan operasional, mengurangi bias manual, dan mempercepat arus informasi lintas fungsi (Rahman & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, disertai dengan restrukturisasi pengambilan keputusan yang lebih desentralistik, menjadi dua pilar penting dalam membangun transparansi manajerial yang efektif di sektor ini.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan untuk PT Surya Saputra Sentosa maupun perusahaan transportasi tambang sejenis dalam meningkatkan transparansi manajerial yakni Pemisahan Peran antara Komisaris dan Manajemen Operasional. Perusahaan perlu secara jelas memisahkan fungsi pengawasan (komisaris) dengan fungsi eksekusi (direksi/manajer). Hal ini akan memberi ruang bagi manajemen untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan mampu mengambil keputusan operasional dengan cepat dan akuntabel.

Perusahaan juga disarankan untuk membangun sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi logistik tambang, dashboard ritasi harian, serta sistem akuntansi berbasis cloud. Ini akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan validasi data secara real time, dan Penyusunan dan Sosialisasi SOP Transparansi. Perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaporan operasional, komunikasi antardivisi, dan pelaporan keuangan internal. SOP ini harus disosialisasikan secara menyeluruh agar menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen formal.

Pelatihan Internal tentang Tata Kelola dan Transparansi juga sangat disarankan, yakni Manajemen dan staf kunci perlu diberikan pelatihan tentang prinsip Good Corporate Governance, tanggung jawab jabatan, dan pentingnya transparansi dalam menciptakan organisasi yang sehat. Ini penting untuk membangun kesadaran bersama serta mendorong Keterlibatan Semua Level dalam Evaluasi Perusahaan, disarankan membuka ruang evaluasi dan umpan balik dari level operasional ke manajemen. Misalnya melalui forum bulanan atau sistem pelaporan ide/usulan dari karyawan. Ini akan meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat budaya terbuka. Rekomendasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki sistem internal, tetapi juga sebagai langkah strategis jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan mitra kerja dalam industri jasa tambang yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- International Finance Corporation. (2009). *Corporate Governance Manual*. IFC World Bank Group.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing
- Rahman, F., & Nugroho, H. A. (2023). Digitalisasi sistem pelaporan sebagai strategi peningkatan transparansi operasional di sektor pertambangan. *Jurnal Manajemen dan Teknologi Tambang*, 11(2), 45–57.
- Sulaiman, M., & Yuniarti, N. (2020). Implementasi prinsip good corporate governance pada usaha jasa pertambangan. *Jurnal Manajemen Pertambangan*, 6(2), 105-117.
- Simanjuntak, D. E., & Lestari, R. (2022). Pengaruh kepemilikan terpusat terhadap efektivitas good corporate governance pada perusahaan jasa tambang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 1–14.
- Tjahjono, B. (2019). Manajemen transparansi dalam industri logistik tambang: studi kasus pada usaha hauling batu bara. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 18(1), 56–65.
- Yuliana, N., & Prasetyo, A. D. (2021). Analisis praktik transparansi manajerial di perusahaan logistik tambang berbasis proyek: Studi pada perusahaan hauling batu bara. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Terapan*, 6(3), 112–123.